



Daya Beli Melemah, Kadin Desak Insentif Pemerintah

Omzet Pengusaha Terpukul sejak 2024

JOGJA - Penurunan daya beli masyarakat telah dirasakan pelaku usaha sejak pertengahan 2024. Hal ini berdampak langsung pada turunnya omzet, terutama di sektor ritel seperti pangan, sandang, dan jasa.

Ketua Komtap Organisasi dan Keanggotaan Kadin DIJ Y Sri Susilo menyebut, keluhan dari para pengusaha sebenarnya sudah terasa sejak kelas menengah mulai melemah. "Ini berimbas pada penurunan penjualan sejak tahun lalu dan berlanjut hingga setelah Idul Fitri 2025," kata Susilo, kemarin (14/4).

Dia mengatakan, meski kondisi tiap perusahaan berbeda, tahun ini sektor perhotelan menjadi salah satu yang paling terpukul. Penurunan tidak hanya karena daya beli masyarakat yang menurun, tetapi juga diperparah oleh Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja pemerintah, yang membatasi kegiatan *meeting, incentive,*



SIDAK: Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo meninjau harga makanan yang dijual di kawasan sirip Malioboro, Jogja beberapa waktu yang lalu. Kegiatan ini untuk memastikan harga kuliner di Malioboro sesuai standar.

convention, and exhibition (MICE).

Kebijakan ini, menyebabkan merosotnya jumlah kegiatan pemerintah yang digelar di hotel dan ruang konvensi. "Sehingga berdampak domino terhadap sektor pendukung seperti transportasi, katering,

dan pusat oleh-oleh," ujarnya.

Dia juga menyebut, libur Lebaran 2025 pun tidak sebaik tahun sebelumnya. Okupansi hotel menurun drastis dan pusat oleh-oleh melaporkan penurunan penjualan hingga 40 persen dibanding tahun lalu. "Tahun ini hanya ramai

di H+3 dan H+4, setelah itu sepi. Tahun lalu sampai H+6 masih ramai," ucapnya.

Menurut Susilo, pemerintah perlu segera memberikan insentif untuk meringankan beban pelaku usaha, misalnya relaksasi kredit dan insentif perpajakan, seperti yang

dilakukan saat pandemi Covid-19. Dia menilai jika tidak ada dukungan, banyak pengusaha lokal yang terancam tidak mampu bertahan.

Dia mengatakan, penurunan daya beli membuat pengusaha harus mengurangi produksi. Ini berarti juga mengurangi pembelian bahan baku dan tenaga kerja. "Rasionalisasi mungkin tak terhindarkan," katanya.

Susilo menambahkan, sebagian pengusaha hanya mampu bertahan 1 hingga 5 bulan tanpa bantuan sebelum akhirnya terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIJ Timotius Apriyanto mengatakan, pentingnya meningkatkan daya saing nasional. Pemerintah, dinilai tetap perlu mendorong efisiensi, memperbaiki infrastruktur, memperkuat kelas menengah, dan mendorong ekspor serta investasi. "Kebijakan MICE seharusnya dikembalikan. Dampaknya sangat besar terhadap perekonomian lokal," ujarnya. (tyo/wia/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005